

## Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 2 Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

*Abdul Aziz<sup>1</sup>, Lalu Parhanuddin<sup>2</sup>, Yulia Patmasari<sup>3</sup>, Muhammad Husni<sup>4</sup>*

<sup>1,2,4</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi. <sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi<sup>3</sup>. Email: [yuliaapatmasari16@gmail.com](mailto:yuliaapatmasari16@gmail.com)<sup>1</sup>, [laluparhanuddin@gmail.com](mailto:laluparhanuddin@gmail.com)<sup>2</sup>, [abdulaziz@hamzanwadi.ac.id](mailto:abdulaziz@hamzanwadi.ac.id)<sup>3</sup>, [mhd\\_husni@hamzanwadi.ac.id](mailto:mhd_husni@hamzanwadi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract:** *This study aims to describe the challenges faced by schools in implementing inclusive education policies at SDN 2 Denggen. This research focuses on the obstacles in providing educational services for students with special needs. This study used a descriptive qualitative approach. The research was conducted at SDN 2 Denggen using primary and secondary data sources. Primary data were collected from key informants including the principal, teachers, and parents of students with special needs. Secondary data included school documents, inclusive education regulations and policies, and literature reviews from previous research. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research instruments consisted of interview guides, field notes, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of inclusive education at SDN 2 Denggen faces interrelated challenges. Limited understanding, lack of school preparedness, inadequate infrastructure, and misperceptions from various parties are major obstacles, resulting in suboptimal management of students with special needs. The conclusion of this study confirms that the implementation of inclusive education still needs to be strengthened through increased teacher capacity, provision of supporting facilities, and support from policymakers. This study recommends that schools and local governments provide more serious support for the implementation of inclusive education.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di SDN 2 Denggen. Penelitian ini difokuskan pada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Denggen dengan sumber data primer dan skunder. Data primer dikumpulkan dari narasumber kunci meliputi kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa berkebutuhan khusus, sedangkan data skunder meliputi dokumen sekolah, peraturan dan kebijakan pendidikan inklusif, dan studi literatur dari penelitian sebelumnya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di SDN 2 Denggen menghadapi tantangan yang saling terkait. Keterbatasan pemahaman, kurangnya kesiapan sekolah, minimnya sarana prasarana, dan persepsi keliru dari berbagai pihak menjadi penghambat utama, sehingga penanganan siswa berkebutuhan khusus belum berjalan optimal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas pendukung, dan dukungan pemangku kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar sekolah dan pemerintah daerah memberikan dukungan lebih serius terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

### Article History

Received: 16-09-25

Reviewed: 21-11-25

Published: 15-03-25

### Key Words

*Inclusive Education, Students With Special Needs, Implementation Challenges*

### Sejarah Artikel

Diterima: 16-09-25

Direview: 21-11-25

Diterbitkan: 15-03-25

### Kata Kunci

*Pendidikan Inklusif, Siswa Berkebutuhan Khusus, Tantangan Implementasi.*

**How to Cite:** Aziz, A., Parhanuddin, L., Patmasari, Y., & Husni, M. (2026). Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SDN 2 Dengan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 12(1), 33–43. <https://doi.org/10.33394/jtni.v12i1.17597>

## PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Sistem ini muncul dari kesadaran akan hak asasi manusia dan pandangan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan saling melengkapi, bukan sebagai penyimpangan. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sendiri adalah anak yang mengalami kesulitan atau perbedaan dalam berbagai aspek, seperti fisik, motorik, mental, intelektual, sosial, emosional, perilaku, atau dalam proses perkembangannya, yang membuat mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini dijelaskan oleh Indramurni (2019), mengacu pada penjelasan J. David Smith. Ganda Sumekar menyatakan bahwa ABK sering juga disebut sebagai anak yang “abnormal,” yang berarti berbeda dari standar umum, sehingga memerlukan pendekatan dan perhatian yang lebih untuk mendukung perkembangan mereka (Indramurni, 2019).

Raihanatul Jannah selaku Sub. Koordinasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Lombok Research Center, 2024) memaparkan sejumlah data terkait kondisi pendidikan di Lombok Timur. Berdasarkan hasil asesemen tahun 2023 di 30 sekolah, ditemukan lebih dari 500 anak mengalami hambatan fungsional, termasuk hambatan penglihatan (12 anak), pendengaran (4 anak), motorik kasar (23 anak), motorik halus (34 anak), bicara (38 anak), kognitif (168 anak), membaca (167 anak), perhatian (117 anak), dan emosi (23 anak).

Konsep pendidikan inklusif ini kemudian pertama kali berkembang di negara-negara Scandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia pada tahun 1960-an, di mana fokus utamanya adalah untuk mengintegrasikan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam pendidikan umum, alih-alih memisahkan mereka ke dalam Pendidikan yang terpisah. Pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy juga mengirimkan para ahli Pendidikan Luar Biasa untuk mempelajari konsep *mainstreaming* dan *least restrictive environment* yang dikembangkan di Scandinavia, yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat (Indramurni, 2019).

Pendidikan inklusif semakin mendapatkan perhatian global pada tahun 1989 dengan dilaksanakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak yang diinisiasi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan di Bangkok pada tahun 1991, dihasilkan deklarasi “*education for all*,” yang mengikat negara-negara anggota untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapat layanan pendidikan yang memadai. Pada tahun 1994, Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, menghasilkan “*the Salamanca statement on inclusive education*,” yang semakin memperkuat komitmen negara-negara di dunia terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif (Phytanza et al., 2023).

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi internasional tersebut, Indonesia juga mulai mengembangkan pendidikan inklusif. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan Deklarasi

Bandung yang menjadi komitmen Indonesia untuk menuju pendidikan inklusif. Kondisi Indonesia dalam kaitannya dengan pendidikan inklusi cukup responsif, antara lain telah diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indramurni, 2019). Kemudian, pada tahun 2005, sebuah simposium internasional di Bukittinggi menghasilkan “Rekomendasi Bukittinggi,” yang menekankan pentingnya terus mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layak.

Implementasi pendidikan inklusif juga mulai bergulir di berbagai daerah di Indonesia. Sejak tahun 2004, beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah, mulai mengimplementasikan program pendidikan inklusif. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah-sekolah reguler, dengan harapan dapat memberikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi semua anak (Indramurni, 2019).

Indramurni (2019) juga menyatakan bahwa sejalan dengan perkembangan pendidikan inklusif, Indonesia pun telah menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaannya. Permendiknas No. 70 Tahun 2009, dalam Pasal 1, mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai: “Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Kemudian, dalam konteks Indonesia, penerapan pendidikan inklusif diatur dalam berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 Tahun 2020. Kebijakan ini mengharuskan semua sekolah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), agar mereka bisa mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, implementasi kebijakan ini di Lombok Timur menghadapi tantangan. Raihanatul Jannah (Lombok Research Center, 2024) menyampaikan salah satunya adalah kesenjangan antara jumlah ABK yang membutuhkan layanan dengan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia. Saat ini, hanya terdapat 45 GPK untuk melayani lebih dari 500 anak yang teridentifikasi mengalami hambatan fungsional.

Penerapan pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi banyak kendala, termasuk di SDN 2 Denggen, sebuah sekolah yang terletak di Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Di SDN 2 Denggen, upaya sekolah dalam memberikan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus masih menghadapi keterbatasan. Meskipun terdapat inisiatif penyediaan fasilitas pendukung seperti kartu huruf dan kata, serta pojok baca, kapasitas dan pemanfaatannya dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi beragam kebutuhan belajar siswa secara efektif. Selain itu, penanganan bagi siswa berkebutuhan khusus setelah mereka diterima di sekolah juga belum menunjukkan adanya program intervensi yang terstruktur dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan, terdapat pola interaksi dan komunikasi yang menunjukkan potensi adanya pemahaman yang belum sepenuhnya optimis mengenai kemampuan perkembangan belajar siswa berkebutuhan khusus di kalangan guru dan orang tua. Hal ini terlihat dalam pendekatan dan dukungan yang diberikan sehari-hari, seperti ketika di sekolah belum tersedia program pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk siswa dengan kesulitan belajar spesifik. Siswa dengan kebutuhan khusus tetap mengikuti pembelajaran umum tanpa penyesuaian metode atau materi, yang dapat mengindikasikan

bahwa kebutuhan mereka belum sepenuhnya dipahami atau diserpons secara optimal. Sementara itu, di rumah, sebagian orang tua belum secara aktif mendampingi anak dalam kegiatan belajar, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan pemahaman atau harapan yang belum sepenuhnya optimis terhadap potensi anak. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan perkembangan akademik siswa, serta menurunnya motivasi dan kepercayaan diri dalam proses belajar.

Terkait sarana dan prasarana, kondisi fisik dan ketersediaan sumber daya pendukung pembelajaran di SDN 2 Denggen belum sepenuhnya dirancang untuk memberikan aksesibilitas yang memadai bagi siswa dengan beragam kebutuhan. Keterbatasan dalam jumlah dan jenis media pembelajaran serta alat bantu belajar yang sesuai menjadi kendala. Selain itu, potensi kendala pada aksesibilitas fisik lingkungan sekolah, seperti keterbatasan fasilitas pendukung di kelas, turut menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Melihat bagaimana hambatan yang dihadapi SDN 2 Denggen dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada di tingkat sekolah terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Dengan mengetahui tantangan-tantangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi yang ada di lapangan sehingga dapat membantu pihak sekolah dan pemerintah daerah dalam memperbaiki implementasi pendidikan inklusif, agar lebih efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, dengan beragam kebutuhan khusus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Creswell & Creswell (2023) menjelaskan bahwa: *“Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures, collecting data in the participants’ setting, analysing the data inductively to build from particulars to general themes, and making interpretations of the meaning of the data.”* Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah cara untuk mendalami dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan, melalui pertanyaan yang berkembang, pengumpulan data di lingkungan partisipan, dan analisis induktif hingga menemukan tema umum. Sementara itu, menurut Creswell (Prasetia, 2022), salah satu jenis penelitian dalam kualitatif adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung pada masa kini. Fokus penelitian ini terletak pada permasalahan nyata sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan.

Sementara itu, instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Meleong, 2021). Peneliti merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data, menganalisis, menafsirkan data, dan melaporkan hasil penelitian. Namun, untuk memandu proses pengumpulan data, instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data skunder. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan mengandalkan narasumber kunci di SDN 2 Denggen, seperti kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua siswa, khususnya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan data skunder meliputi dokumen sekolah yang terkait dengan pelaksanaan

pendidikan inklusif, peraturan dan kebijakan pendidikan inklusif yang relevan, dan studi literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Saleh (2017). Model ini menekankan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang interaktif dan berkelanjutan, berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Proses ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Proses ini meliputi tiga kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di SDN 2 Denggen hanya berasal dari satu kategori, yaitu anak dengan hambatan belajar spesifik berupa disleksia. Kondisi ini berimplikasi pada jenis tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan pemahaman guru dan orang tua mengenai pendidikan inklusif dan disleksia, kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai, sarana prasarana pendukung khusus untuk anak dengan kesulitan membaca, persepsi guru dan orang tua terhadap potensi anak disleksia, serta penanganan berkelanjutan untuk siswa disleksia. Hal ini dibuktikan dan diuraikan lebih lanjut dalam poin-poin berikut.

### 1. Pemahaman Guru dan Orang Tua tentang Konsep Pendidikan Inklusif dan Kesulitan Belajar Spesifik

Kesulitan belajar spesifik yang ditemukan di SDN 2 Denggen adalah disleksia. Oleh karena itu, pemahaman guru dan orang tua tentang pendidikan inklusif juga mencerminkan bagaimana mereka memahami kondisi disleksia yang dialami sebagian siswa.

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman guru mengenai konsep pendidikan inklusif masih beragam. Sebagian guru memaknai inklusi sebatas memberi bimbingan akademik. Hal ini juga tampak pada hasil observasi, di mana guru memberikan pendampingan membaca kepada anak disleksia di luar jam pelajaran, namun belum dengan strategi yang sesuai dengan anak disleksia. Guru lebih sering memahami anak dengan disleksia sebagai siswa yang “sulit menerima pelajaran”, bukan sebagai anak dengan hambatan belajar spesifik yang memerlukan pendekatan multisensori atau media baca ramah disleksia. Misalnya, media khusus yang ramah disleksia dapat berupa buku atau dengan font besar, kartu huruf, suku kata, kartu kata berwarna kontras, papan huruf timbul, papan tulis kecil individual/*whiteboard portable*, serta media berbasis audio-visual. Karena hasil observasi menunjukkan sebagian besar media tersebut tidak tersedia, kemudian hasil dokumentasi juga tidak ditemukan adanya media adaptif tersebut, dukungan yang diberikan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan belajar anak disleksia. Kondisi ini sejalan dengan Anggreani et al. (2024) yang menegaskan bahwa rendahnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusif menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapannya di sekolah dasar.

Keragaman pemahaman guru juga dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman mereka. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa tidak ada tenaga pendidik di SDN 2 Denggen yang memiliki latar belakang pendidikan khusus, dan dari wawancara diketahui bahwa guru belum pernah memperoleh pelatihan terkait penanganan anak disleksia.

Sementara itu, wawancara dengan orang tua mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua siswa yang belum memahami pendidikan inklusif. Masih banyak yang menyatakan “belum pernah mendengar” atau “belum tahu” mengenai pendidikan inklusif maupun tentang disleksia itu sendiri. Minimnya pemahaman ini diperkuat oleh latar belakang pendidikan formal orang tua yang mayoritas lulusan SD atau SMP. Akibatnya, banyak orang tua yang cenderung menganggap anak disleksia hanya malas atau kurang latihan membaca, sehingga dukungan belajar di rumah tidak diberikan secara sesuai.

Keterbatasan pemahaman guru dan orang tua tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dengan praktik di lapangan. Esensi pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan ABK di sekolah regular, melainkan memastikan mereka mendapat dukungan sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sumarni (Biantoro, 2024) bahwa pendidikan inklusif adalah layanan yang memberi kesempatan semua anak untuk belajar bersama dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masing-masing. Mujiati & Yoenanto (2023) juga menegaskan bahwa seharusnya kehadiran ABK mendorong terciptanya budaya inklusif agar mereka memperoleh hak yang sama. Dalam konteks SDN 2 Denggen, karena guru dan orang tua belum memahami secara khusus tentang disleksia, maka dukungan yang diberikan belum mampu mewujudkan budaya inklusif secara utuh.

## 2. Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif



Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Membaca Siswa ABK oleh Guru



Gambar 2. Kegiatan Membaca dengan Pendampingan Teman Sebaya

Di sisi komitmen, sekolah sekolah sebenarnya telah menunjukkan kepedulian terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, komitmen ini tertuang dalam visi dan misi sekolah yang ingin “mewujudkan peserta didik yang religius, sehat, kreatif, inovatif, berprestasi, mandiri, dan peduli lingkungan” juga tujuan sekolah yang ingin “mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya”, yang pada dasarnya selaras dengan pandangan Phytanza et al. (2023) bahwa sekolah inklusif terbuka bagi semua siswa dan bertujuan mengembangkan potensi setiap anak. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi memperkuat bahwa komitmen tersebut juga tampak dalam praktik sehari-hari, misalnya melalui bimbingan membaca yang diberikan guru dan kegiatan literasi mingguan. Meskipun kegiatan tersebut belum ditujukan secara khusus untuk anak disleksia, hal ini menunjukkan adanya perhatian guru terhadap kebutuhan belajar yang beragam. Selain itu, hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan adanya komitmen sekolah melalui

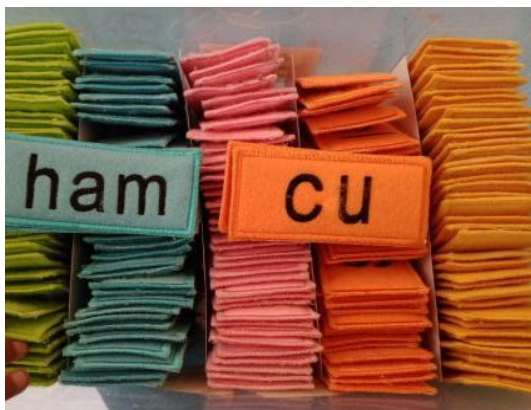
budaya inklusi yang mulai terbentuk di antara siswa, misalnya ketika siswa lain turut membantu temannya yang mengalami kesulitan membaca.

Namun, secara prosedural dan administratif, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki Program Pembelajaran Individual (PPI) dan evaluasi khusus untuk anak disleksia. Temuan ini diperkuat dengan hasil dokumentasi, di mana tidak terdapat Surat Keputusan (SK) formal penyelenggaraan pendidikan inklusif, kebijakan internal, PPI, maupun mekanisme evaluasi khusus. Akibatnya, identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus, termasuk disleksia, hanya dilakukan secara sederhana melalui observasi wali kelas tanpa instrument asesmen formal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Andriyan et al. (2023) yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta ketiadaan kebijakan formal menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK). Temuan ini diperkuat oleh hasil dokumentasi yang memang tidak mencatat keberadaan GPK di SDN 2 Denggen. Hal tersebut karena sekolah tidak memiliki alokasi dana khusus untuk menghadirkan GPK, mengingat keberadaan ABK dengan kesulitan belajar seperti disleksia belum dianggap sebagai prioritas mendesak, padahal 9,4% dari 191 siswa adalah anak disleksia. Dampaknya, penanganan lebih banyak dilakukan melalui inisiatif guru kelas.

Upaya sekolah untuk mengajukan pembangunan fasilitas baru juga terkendala oleh prioritas pembangunan di sekolah lain. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah daerah, sebagaimana Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 sebenarnya telah mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya dirasakan oleh sekolah. Dengan demikian, meskipun pihak sekolah mengakui bahwa pendidikan inklusif merupakan amanat undang-undang, namun kesenjangan antara komitmen dan administratif ini menjadikan kesiapan SDN 2 Denggen dapat dikategorikan belum optimal.

### 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Inklusif



Gambar 3. Media Pembelajaran Suku Kata



Gambar 4. Media Pembelajaran Huruf Abjad

Fasilitas umum yang standar, seperti ruang belajar, meja dan kursi siswa, papan tulis, serta meja dan kursi guru sudah tersedia. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara, sekolah memiliki buku sederhana hasil dicetak sendiri yang disesuaikan untuk anak disleksia. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa media yang digunakan di kelas lebih sederhana, berupa kartu suku kata dan tempelan huruf abjad, sedangkan dokumentasi sekolah tidak mencatat dan menunjukkan adanya media adaptif. Ketidak-konsistenan antara informasi dari wawancara, observasi dan dokumentasi ini menunjukkan bahwa media yang ada tidak terdokumentasi secara resmi di sekolah. Sementara buku yang dimaksud dalam wawancara tidak didukung dengan bukti fisik dan dokumen sekolah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penyediaan media khusus masih bergantung pada inisiatif guru dan belum diterapkan secara menyeluruh.

Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa fasilitas umum yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk anak disleksia, seperti perpustakaan dan LCD sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum maksimal. Sedangkan ruang khusus atau pojok baca untuk bimbingan individual tidak ditemukan. Hasil wawancara memperkuat temuan ini karena mengakui bahwa fasilitas pendukung untuk pembelajaran individual belum memadai. Kondisi ini dapat mengakibatkan implementasi pendidikan inklusif menjadi kurang efektif. Sejalan dengan Munajah et al. (2021) yang menyebutkan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.

Padahal prinsip dasar pendidikan inklusif menekankan bahwa lingkungan belajar harus mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa, termasuk mereka yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas dan media pembelajaran adaptif bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dalam konteks SDN 2 Denggen, secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana yang inklusif dapat dikategorikan belum memadai.

#### **4. Persepsi Guru dan Orang Tua terhadap Potensi Siswa Berkebutuhan Khusus**

Persepsi guru dan orang tua terhadap potensi siswa berkebutuhan khusus di SDN 2 Denggen masih beragam dan belum sepenuhnya mendukung implementasi pendidikan inklusif. Siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini hanya berasal dari satu kategori, yaitu anak dengan hambatan belajar spesifik berupa disleksia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, guru umumnya menunjukkan kepedulian melalui bimbingan tambahan dan penyediaan media sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa guru cenderung memandang kesulitan membaca sebagai tantangan yang perlu diatasi, bukan sebagai batasan mutlak. Persepsi positif ini selaras dengan semangat pendidikan inklusif, sebagaimana Meka et al. (2023) menekankan bahwa pendidikan inklusif bertujuan mengakomodasi kebutuhan belajar beragam siswa.

Sementara itu, hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa banyak orang tua kesulitan memahami kondisi anak karena keterbatasan pendidikan dan kesibukan bekerja. Ungkapan orang tua bahwa mereka merasa “lelah memikirkannya” atau sikap “memaklumi” dengan anggapan anaknya “memang kurang”, juga sikap kecenderungan menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah menunjukkan adanya rasa putus asa dan lelah secara mental. Kondisi ini tentu dapat menghambat implementasi pendidikan inklusif yang mana membutuhkan partisipasi aktif semua pihak,

termasuk orang tua, sebagaimana Qistan & Swandi (2024) yang menekankan bahwa persepsi orang tua berperan penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif.

Tantangan lain yang muncul adalah adanya kecenderungan sebagian guru maupun orang tua untuk menganggap kesulitan membaca pada anak disleksia sebagai masalah motivasi atau kemalasan. Persepsi ini kurang tepat, karena disleksia bukan disebabkan oleh kurangnya kemauan belajar, melainkan perbedaan cara otak memproses bahasa. Anggapan keliru ini berpotensi melahirkan strategi pengajaran dan pola asuh yang tidak sesuai, yang dapat menurunkan rasa percaya diri anak dan menghambat perkembangan literasinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan orang tua yang mayoritas rendah, serta pelatihan bagi guru terkait anak disleksia belum diberikan. Diperkuat dengan hasil dokumentasi bahwa tidak ditemukan adanya tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa persepsi yang benar memegang peran penting dalam mendukung potensi anak disleksia. Persepsi positif dapat mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang suportif, sementara persepsi yang keliru justru membatasi perkembangan anak. Oleh karena itu, perbaikan persepsi dan dukungan terhadap anak disleksia membutuhkan strategi terpadu, antara lain peningkatan kapasitas guru, sosialisasi yang berkelanjutan kepada orang tua, serta penguatan kolaborasi antara sekolah dan keluarga, sebagaimana Kriswanto et al. (2023) yang menyoroti pentingnya dukungan kepemimpinan kepala sekolah dan kemitraan yang baik dengan orang tua sebagai faktor pendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

## 5. Penanganan Berkelanjutan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan hasil observasi, penanganan untuk anak disleksia sudah diberikan melalui bimbingan membaca oleh guru. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki kegiatan literasi mingguan, sebagaimana juga tercatat dalam dokumentasi sekolah. Namun, kegiatan ini ditujukan untuk seluruh siswa dan tidak dirancang secara khusus bagi anak dengan hambatan belajar spesifik seperti disleksia.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) maupun program khusus yang dirancang untuk anak disleksia. Dengan demikian, penanganan lebih banyak dilakukan melalui inisiatif guru kelas, tanpa adanya kerangka program yang terencana secara khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Hasil dokumentasi juga sebenarnya tercatat adanya kemitraan sekolah dengan Perpustakaan Daerah terkait pendampingan program literasi, yang seharusnya dapat menjadi dukungan tambahan untuk anak disleksia, namun hasil observasi dan wawancara tidak menyinggung adanya kerja sama yang terjalin. Hal ini mengindikasikan bahwa program kemitraan yang tercatat dalam dokumen sekolah tidak secara rutin dilaksanakan atau belum sepenuhnya terlaksana.

Dengan demikian, penanganan berkelanjutan bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN 2 Denggen dapat dikategorikan belum optimal, karena penanganan yang diberikan masih bersifat inisiatif guru sehingga penanganan yang ideal belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana dinyatakan Anjasari (Angreni & Sari, 2020) bahwa pendidikan inklusif mencakup penerimaan sekaligus pemberian layanan pendukung sesuai kebutuhan anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di SDN 2 Denggen, dapat disimpulkan bahwa siswa berkebutuhan khusus yang ditemukan hanya berasal dari satu kategori, yaitu anak dengan hambatan belajar spesifik berupa disleksia. Namun, meskipun hanya terbatas pada satu jenis kebutuhan khusus, implementasi pendidikan inklusif tetap menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pemahaman guru dan orang tua mengenai pendidikan inklusif dan disleksia berdampak pada minimnya partisipasi dalam mendukung anak belajar sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, kesiapan sekolah juga belum optimal karena belum memiliki kebijakan formal, Program Pembelajaran Individual (PPI), evaluasi khusus, maupun Guru Pendamping Khusus (GPK). Sarana dan prasarana pembelajaran adaptif yang ramah disleksia juga masih belum memadai, sementara fasilitas yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, persepsi keliru sebagian guru dan orang tua yang menganggap kesulitan membaca sebagai masalah motivasi turut memperlebar kesenjangan dukungan. Akumulasi hambatan tersebut menyebabkan penanganan yang ada masih bersifat inisiatif guru secara individual dan belum terstruktur dalam program yang berkelanjutan.

## SARAN

Guna meningkatkan implementasi pendidikan inklusif di SDN 2 Denggen, sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru, membentuk tim khusus penyusun PPI, menjalin kerja sama dengan dinas atau ahli, serta melakukan pendataan resmi terkait ABK dan sarana prasarana. Guru diharapkan aktif memperdalam pengetahuan melalui pelatihan, menerapkan metode pembelajaran adaptif, serta mencatat perkembangan siswa secara terstruktur. Orang tua perlu meningkatkan pemahaman tentang disleksia dan menjalin komunikasi erat dengan sekolah agar strategi bimbingan lebih konsisten. Sementara itu, pemerintah perlu mendukung dengan kebijakan anggaran khusus, pedoman teknis yang lebih rinci, serta kampanye sosialisasi berkelanjutan untuk membangun paradigma inklusif yang utuh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Lalu Parhanuddin, M.Pd. dan Bapak Abdul Aziz, M.Pd. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang berharga selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Rasa terima kasih yang mendalam juga diberikan kepada pihak SDN 2 Denggen, khususnya kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, atas kerja sama dan kontribusi data yang sangat berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2023). Pendidikan inklusi: tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94–106.
- Anggreani, K., Tafsira, N. A., Febriyani, T., & Syafitri, E. (2024). Implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar: tantangan dan strategi efektif. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(2), 199–204.
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi dan implementasi pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Sumatera Baratt. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145–153.
- Biantoro, O. F. (2024). Pendidikan inklusif di Indonesia: peluang dan tantangan. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 24–33.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
- Indramurni. (2019). *Pendidikan inklusif solusi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Kriswanto, D., Suyatno, & Sukirman. (2023). Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar: analisis faktor-faktor dan solusi yang ditawarkan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3081–3090.
- Lombok Research Center. (2024). *LRC dorong kesiapan Lombok Timur dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif*. Retrived May, 20, 2025, from Lumbung Inovasi website: <https://lumbunginovasi.id/daerah/lrc-dorong-kesiapan-lombok-timur-dalam-penyelenggaraan-pendidikan-inklusif/>.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan inklusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 11–19.
- Meleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Rev. ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiafiat, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(2), 1108–1116.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 2020. Selong: Bupati Lombok Timur.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. 2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Phytanza, D. T., Pinru, R. A., Hasyim, Mappaompo, A., Rahmi, S., Oualeng, A., Silaban, P. S. M., Suyuti, Iswati, & Rukmini, B. S. (2023). *Pendidikan inklusif: konsep, implementasi, dan tujuan*. Batam: CV Rey MediaGrafika.
- Prasetya, I. (2022). *Metodologi penelitian pendekatan teori dan praktik*. Medan: Umsu Press.
- Qistan, R. R., & Swandi, N. L. I. D. (2024). Perspektif Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusi: Temuan dari Tinjauan Literatur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(5), 1257–1268.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.